

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>x</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Hak Asasi Manusia dan Tanah Dalam Perspektif Hukum Internasional .....	9
B. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Diskriminasi Ras Dalam Hukum Internasional .....	15
C. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Kebijakan Publik .....	20
D. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Hak Atas Tanah Menurut Hukum Positif Indonesia.....	23
E. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Nonpribumi di Yogyakarta .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	39
B. Bahan Penelitian .....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Analisis Data.....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Pengaturan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terkait Kebijakan Berbasis Ras yang Menyangkut Tentang Pemenuhan Hak Kepemilikan ( <i>Right to Property</i> ).....	42
1. Kebijakan Berbasis Ras Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional .....	42

2.	Hak Kepemilikan Terkait Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional .....	68
3.	Kebijakan Berbasis Ras Terkait Hak Kepemilikan .....	79
B.	Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Nonpribumi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Mengenai Kebijakan Berbasis Ras .....	82
1.	Aspek Filosofis, Historis, dan Ekonomi serta Implikasi Kebijakan Pertanahan bagi WNI Nonpribumi di Yogyakarta .....	82
2.	Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Nonpribumi Sebagai Kebijakan Berbasis Ras Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional .....	94
C.	Catatan Kritis Terhadap Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terkait Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Nonpribumi di Yogyakarta .....	105
1.	Ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang Berlaku Terhadap Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Nonpribumi di Yogyakarta .....	105
2.	Perdebatan Mengenai Penerapan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Nonpribumi di Yogyakarta.....	116
3.	Posisi Indonesia Sebagai Negara Pihak Dalam Ketentuan Hukum Internasional.....	126
BAB V PENUTUP .....		139
A.	Kesimpulan .....	139
B.	Saran .....	141
DAFTAR PUSTAKA .....		145